

SEKULARISASI DI INDONESIA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KONSEP KENEGARAAN

Oleh : Suhandi

Abstrak

Sekulerisme, merupakan hal yang menunjukkan sesuatu yang bersifat keduniawian, sesuatu yang dilawankan dengan selain dunia atau spiritual, dengan kata lain sekuler berarti pemisahan antara dunia dan agama, masalah dunia tetap dijadikan masalah dunia dan masalah spiritual (agama) tetap dijadikan masalah agama. Dengan demikian sekuler adalah sifat melepaskan dunia ini dari agama. Untuk itu diperlukan suatu proses, dan proses ini disebut sekularisasi. Indonesia sebagai negara yang pluralistik, pada satu sisi memiliki penduduk muslim yang mayoritas meskipun agama lain tumbuh dan berkembang secara dinamis di bumi nusantara ini. Namun di sisi yang lain penegakkan islam sebagai dasar negara sangat sulit untuk diwujudkan. Dalam sejarah Indonesia pemikiran-pemikiran para tokoh Islam untuk menjadikan Islam sebagai azaz negara telah diwacanakan pada awal kemerdekaan Indonesia. Sehingga terjadi polemik yang panjang antara M Natsir dengan Soekarno. Perdebatan ini kemudian berkepanjangan pada sidang-sidang kenegaraan yang berimplikasi pada penataan konsep kenegaraan. Sehingga pada tatanan praktis melahirkan konsep kenegaraan yang sekular dimana Islam tidak dijadikan sebagai azas utama dalam penataan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kata Kunci : Sekular dan Konsep Kenegaraan

Pendahuluan

Islam sebagai ajaran yang bersifat transenden, dalam perjalanan sejarahnya telah berhasil mewujudkan pola-pola pandangan dunia tertentu bagi manusia. Pola-pola pandangan yang mendunia dalam pranata, institusi sosial dan kebudayaan itu turut mempengaruhi perkembangan dunia. Melalui cara itu Islam berperan sebagai subjek yang menentukan jalan sejarah, tetapi kenisbian pranata dan institusi-institusi duniawi tadi juga

memaksakan perubahan dan penyesuaian terus-menerus terhadap pandangan dunia dengan tingkah laku penganut Islam dengan fenomena perubahan sosial selalu mempunyai hubungan saling mempengaruhi satu sama lain. Dalam pergumulan itu, Islam banyak tergantung pada kekuatan yang dapat dikembangkan oleh Islam itu sendiri. Apakah Islam akan menjadi subjek yang dinamis untuk menggerakkan perubahan sosial atau justru Islam yang menjadi objek dan sasaran perubahan sosial.

Satu hal yang tak dapat dipungkiri dalam membicarakan Islam dan sejarahnya adalah pertumbuhan dan perkembangannya yang sejalan dengan tumbuh-kembangnya sistem politik yang diilhaminya. Nabi Muhammad saw memulai agenda politiknya dengan mendirikan kota Madinah, dimana beliau menempatkan dirinya tidak saja sebagai pemimpin agama,¹ tetapi juga sebagai pemimpin masyarakat, kepala negara, dan panglima perang. Apa yang dilaksanakan oleh Nabi ini, menurut Dawam Raharjo merupakan refleksi dari kata madinah, yang secara etimologi sepadan dengan kata *tamadun* (peradaban) dan *tsaqafah* (kebudayaan).²

Berkaitan dengan itu, tak heran bila banyak kalangan melihat keterkaitan Islam dengan negara demikian besar. Maxim Rodinson, seorang marxis ahli Islam, misalnya melihat bahwa agama Islam menyuguhkan kepada para pemeluknya suatu proyek kemasyarakatan, suatu program yang harus diwujudkan dimuka bumi.³ Proyek ini, selanjutnya setelah wafat Rasul, dilanjutkan

¹ Demikianlah secara gambalang dijelaskan oleh John L. Esposito dalam "*Muhammad Iqbal dan Negara Islam*": Muhammad bukan saja utusan Tuhan, tapi juga teladan atau contoh bagi masyarakat Islam. Sesungguhnya sunnahnya telah menjadi normatif. Tradisi-tradisi (hadits) tentang kata-kata dan perilaku Nabi, sejak dulu telah disimpan dan dihimpun. Dan bersama Qur'an, telah menjadi sumber material hukum Islam. Lagi pula, Muhammadlah yang telah menjadi Nabi-Negarawan masyarakat Islam pertama di Madinah. Dengan demikian, dalam kehidupannya, ia mencerminkan persatuan agama dan negara. Lihat John L. Esposito (ed), *Dinamika Kebangkitan Islam: Watak, Proses dan Tantangan*, Rajawali Pers, Jakarta, 1987. Hal. 218.

² Dawam Raharjo, *Intelektual Intelegensia Dan Perilaku Politik Bangsa*, Mizan, Bandung, 1993. Hal. 56-57.

³ John L. Esposito (ed). Op.Cit. Hal. 147.

oleh para Khulafah al-Rasyidin yang menjalankannya berdasarkan prinsip yang telah dirintis dan diletakkan Nabi Saw.

Namun dalam perkembangan secara di beberapa Negara yang mayoritas dihuni oleh umat Islam banyak melahirkan pemikiran-pemikiran yang paradok dengan realitas awal lahirnya Islam. Di Indonesia misalnya munculnya sangat subur pemikiran-pemikiran sekularis yang mencoba melakukan dikotomi antara Islam dan Negara. Oleh karena itu pada tulisan ini akan memaparkan lebih jauh tentang lahirnya pemikiran-pemikiran secular di Indonesia yang berimplikasi pada konsep kenegaraan.

Pengertian Sekular

Secara etimologi, kata Sekular berasal dari bahasa Latin, yaitu *saeculum* yang berarti masa (waktu) atau generasi.⁴ Kata *saeculum* sebenarnya adalah salah satu dari dua kata Latin yang berarti dunia. Kata lainnya ialah *mundus*. *Saeculum* menunjukkan waktu dan *mundus* menunjukkan ruang. *Saeculum* sendiri adalah lawan dari kata *eternum* yang artinya abadi, yang digunakan untuk menunjukkan alam yang kekal abadi, yaitu alam sesudah dunia.⁵

Dalam bahasa Arab, kata sekular digunakan istilah *laa diniyyah atau duniawiyah*, yang maknanya tidak hanya lawan ukhrawi saja tetapi memiliki makna yang lebih spesifik lagi, yakni sesuatu yang tidak ada kaitan dengan dien (agama), atau sesuatu yang hubungannya dengan agama adalah hubungan lawan.⁶ Sedangkan menurut Syahrin Harahap, bahwa Bahasa Arab mengadopsi istilah ini dari penggunaan orang-orang Kristen Arab yang menggunakan istilah sekular untuk mengekspresikan gagasan ini sebelum ia menarik perhatian kaum muslimin. Kata yang mereka ciptakan adalah *'alamani* atau 'alam (dunia) yang maknanya adalah duniawi, yang dilawankan dengan selain dunia atau spiritual.⁷

⁴ Harvey Cox, *The Secular City*, New York, The Macmillan Company, 1966. Hal. 2.

⁵ Syahrin Harahap, *Al-Qur 'an Dan Sekularisasi*, PT. Tara Wacana, Yogyakarta, 1994. Hal. 12.

⁶ Dr. Yusuf Qaradhawy, *Sekular Ekstrim, Terjemah Nabhani Idris*, Pustaka al-Kautsar, Jakarta Timur, 2000. Hal. 1

⁷ Syahrin Harahap, *Op Cit*. Hal. 13.

Di dunia Islam istilah sekular ini pertama kali dipopulerkan oleh Zia Gokalp (1875-1924), sosiolog terkemuka dan teoritikus nasionalis Turki. Ini sering kali dipahami dalam pengertian irreligius atau bahkan anti religius, dan tafsiran ini lebih jauh memunculkan kecurigaan yang juga menyertai sikap terhadap gagasan itu.⁸

Secara terminologi, kata sekular atau faham sekular dalam Ensiklopedi Britania, sebagaimana dikutip oleh Dr. Yusuf Qardhawy, bahwa :

Sekularisme adalah sebuah gerakan kemasyarakatan yang bertujuan memalingkan manusia dari kehidupan akhirat dengan semata-mata berorientasi kepada dunia. Gerakan ini dilancarkan karena pada abad-abad pertengahan, orang sangat cenderung kepada Allah dan hari akhirat dan menjauhi dunia. Sekularisme tampil untuk menghadapinya dan untuk membawa kecenderungan manusia yang pada abad kebangkitan, orang menampakkan ketergantungannya yang besar terhadap aktualisasi kebudayaan dan kemanusiaan serta kemungkinan terealisasinya ambisi mereka terhadap dunia.⁹

Sementara dalam Ensiklopedi Indonesia sekular adalah "suatu paham di mana orang, golongan, masyarakat berhaluan dunia, artinya semakin berpaling dari agama, atau semakin kurang memperdulikan nilai-nilai atau norma-norma yang dianggap kekal dan sebagainya."¹⁰

Dari beberapa ungkapan tentang peristilahan sekuler di atas, dapat ditarik suatu pemahaman bahwa sekular itu bersifat duniawi, sehingga yang disebut sekular adalah yang bersifat keduniaan, artinya adanya pemisahan antara dunia dan agama; masalah keduniaan tetap dijadikan masalah dunia dan masalah spiritualitas (agama) tetap dijadikan masalah agama. Dengan demikian sekular adalah sifat melepaskan dunia ini dari agama. Untuk itu diperlukan suatu proses. Dan proses ini disebut dengan sekularisasi.

⁸ *Ibid.*, hal. 12-13

⁹ Dr. Yusuf Qardhawy, *Op Cit.*, hal. 2.

¹⁰ Hasan Shadily, *Ensiklopedi Indonesia*, Jilid 5, Ichtiar Baru-Hoeve, Jakarta, 1984. Hal. 3061.

Munculnya Faham Sekular

Secara historis, pemikiran sekular awalnya muncul dari Barat. Ketika terjadi apa yang disebut dengan The Dark Age pada abad pertengahan. Abad ini dianggap sebagai abad kegelapan bagi dunia Barat,¹¹ karena kehadiran dan paksaan doktrin gereja yang bertentangan dengan rasio dan pengetahuan para ilmuwan dan ahli pikir pada masa itu. Gereja menganggap kafir dan menganiaya orang yang menyampaikan teori ilmu yang bertentangan dengan ajarannya.

Hal ini terjadi berawal dari ide dan pemikiran para aktivis gereja yang memutuskan bahwa "Hanya merekalah yang berhak memahami dan menafsirkan kitab suci. Mereka menolak setiap pemikiran yang datang dari luar yang berusaha memahami atau menafsirkannya."¹² Kondisi ini mengakibatkan interpretasi yang subjektif tergantung pada kepentingan-kepentingan para aktivis gereja, meskipun hasilnya akan merugikan orang lain, karena doktrin ini menjadi kebenaran yang mutlak di mata mereka.

Dan sebagai akibat dari ini semua, muncullah pemahaman-pemahaman yang salah terhadap kitab suci (Injil), dan cenderung menyeleweng dari dasar ajaran Injil itu sendiri. Hal ini dijelaskan oleh Ismail al-Kilany, bahwa mereka memasukkan hal-hal yang serba tersamar dalam acara ritual peribadatan. Sebagai contoh yang nyata ialah masalah jamuan makan untuk Tuhan. Acara seperti ini merupakan hal baru yang tidak terdapat dalam kitab suci, tidak dilakukan oleh orang-orang Kristen periode sebelumnya dan juga tidak terdapat dalam kitab-kitab suci sebelumnya. Dalam jamuan itu orang-orang Kristen memakan roti dan meminum arak pada hari raya Paskah. Mereka menamakannya jamuan makan Tuhan. Orang-orang gereja menganggap roti itu sebagai pengganti jasad Almasih dan arak

¹¹ Negera-negera Kristen sepanjang abad pertengahan dalam keadaan pasif dan mandeg total. Kajian ilmiah terhenti di tangan orang-orang yang menamakan dirinya sebagai penghamba Taurat dan Injil. Setelah masa kebangkitan Eropa, maka terjadilah kilas balik yang dilakukan para ilmuwan terhadap saingan mereka sebelumnya (gereja). Dan pengaruhnya terus berlanjut hingga kini.. Sebagaimana dikutip oleh Ismail al-Kilany, dalam *Sekularisme: Upaya Memisahkan Agama dari Negara*, Penerjemah Kathur Suhandi, Pustaka al-Kautsar, Jakarta Timur, 1992. Hal. 111-112.

¹² *Ibid.*, hal. 112

sebagai pengganti darahnya yang tertumpah. Barang siapa yang makan roti dan minum arak itu maka Almasih telah masuk ke dalam badannya dengan darah dan dagingnya.¹³

Gereja mewajibkan manusia menerima anggapan ini dan melarang mereka membangkangnya. Kalau tidak, maka mereka akan dikeluarkan dari kelompok gereja, karena dianggap telah kafir. Dan masalah ini tidak hanya sebatas pada masalah agama, tetapi juga merembet pada masalah alam dan kehidupan. Orang-orang gereja mengeluarkan pendapat dan teori-teori geografi, sejarah, astronomi dan fisika yang dianggap suci, tidak boleh dibantah, tidak boleh didiskusikan, tidak boleh dilakukan eksperimen dan tidak boleh ada pendapat lain.¹⁴ Sebab pada hakikatnya mereka tidak memiliki pengetahuan kecuali yang ada pada dirinya, sehingga mereka tidak mau mengakui hasil pemikiran yang lain, walaupun pemikiran itu sesungguhnya benar. Setiap aktivitas selain yang mereka hasilkan dianggap sebagai aktivitas yang tercela dan tertolak.

Sementara para ilmuwan terus menerus dengan keberanian mereka menolak pendapat gerja dan menjelaskan secara terang-terangan kesalahan pendapatnya. Hal ini menimbulkan reaksi gereja untuk melakukan tindakan-tindakan penyiksaan. Hal ini di kemukakan oleh Maurice Bucaille, bahwa di dalam dunia Kristen selama beberapa abad, kekuasaan gereja selalu menentang perkembangan ilmu. Gereja selalu menjatuhkan hukuman kepada orang-orang yang mengembangkan ilmu pengetahuan. Sehingga banyak para ilmuwan yang menemui ajalnya dengan cara disiksa dan dibakar atau mereka dipaksa memohon ampunan. Dalam hal ini cerita mengenai Galileo selalu disebut-sebut. Ia dijatuhi hukuman mati karena meresume penemuan Copernicus tentang rotasi bumi yang bertentangan dengan Taurat.¹⁵

Setelah orang-orang Kristen di bagian barat Eropa mengadakan pembaharuan gereja dengan menghentikan penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan orang-orangnya dan menciptakan hubungan yang harmonis dengan seluruh dunia Kristen, maka pada abad ke-16 mulailah para pemikir terbebas

¹³ *Ibid.*, hal. 112

¹⁴ *Ibid.*, hal. 112

¹⁵ *Ibid.*, hal. 113

dari beban berat yang dipikulkan gereja dan yang telah membelenggu kebebasan berfikir dan kajian ilmiah selama abad pertengahan. Karena gereja pada abad pertengahan banyak mencampuri urusan negara dan memegang kekuasaan politik yang lebih besar.¹⁶ Sehingga pada abad pertengahan filsafat mencurahkan perhatiannya kepada hal-hal yang abstrak, yang didominasi oleh religiusitas gereja.

Kemudian pada zaman Renaisans perhatian filsafat ditujukan kepada hal-hal yang konkrit, kepada alam semesta, kepada manusia sendiri, kepada hidup kemasyarakatan, dan juga sejarah,¹⁷ maka dengan gerakan Renaisans para pemikir Barat mulai menempatkan individu manusia dengan akal sehat dan kebebasan mutlak untuk menemukan pemecahan semua masalah. Pemikiran Renaisans mencapai kedewasaannya pada abad ke-17 yang didominasi oleh rasionalisme dan empirisme.

Abad ke-18 dipandang sebagai zaman Pencerahan (Aufklärung). Pada abad ini dimulailah suatu zaman baru yang telah berakar pada pemikiran Renaisans serta buah dari pemikiran Rasionalisme dan Empirisme. Pemikiran pencerahan dipengaruhi sekali oleh ilmu pengetahuan alam. Salah satu gejala pencerahan di Inggris ditandai dengan munculnya Deisme, yaitu suatu faham yang mengakui adanya Wujud Agung yang menciptakan alam semesta ini yakni "Tuhan", tetapi setelah alam ini diciptakan Tuhan telah memasukkan hukum-hukum alam ke dalamnya untuk menentukan nasibnya sendiri.¹⁸

Karena sifatnya yang evolusioner, kapan munculnya sekularisme secara resmi belum jelas, hanya saja secara etis, sekularisme muncul di Inggris pada tahun 1846. Ketika George Jacob Holyouke menjauhkan diri dari gereja dan bahkan anti pada Kristen. Karena gereja dianggap kurang memiliki simpati sosial. Dia mengalihkan perhatiannya pada petualangan politik di mana ia berperan sebagai missionari sosial.¹⁹

¹⁶ Mark Juergensmeyer, *Menentang Negara Sekular*, Penerjemah Noorhaidi, Mizan, Bandung, 1998. Hal. 41.

¹⁷ Harun Hadiwijono, *Sari Sejarah Filsafat Barat 2*, Kanisius, Yogyakarta, 1983. Hal. 12.

¹⁸ *Ibid.* Hal. 30.

¹⁹ James Hastings (ed). *Encyclopedia of Religion and Ethic*, Vol. XI, Charles Scribner' simbol-simbol Sons [s.a.]. New York. Hal. 384.

Namun secara global, faham ini muncul sejak terjadinya revolusi Perancis tahun 1789.²⁰ Pendapat ini muncul karena yang menjadi tolok ukur sekularisme adalah ilmu pengetahuan yang berkembang secara otonomi, tanpa adanya intervensi doktrin agama. Dikemukakan juga oleh Juergensmeyer, bahwa "Revolusi Perancis mengambil banyak aspek revolusi religius, di mana ilmu pengetahuan dan hukum alam dicurahkan untuk memerangi gereja."²¹ Revolusi inilah yang dapat menyingkirkan para pemimpin agama. Mereka dijauhkan dari medan kehidupan, terutama pada sektor hukum dan pemerintahan. Semua ini akarnya dari pemikiran zaman Renaisans.²² Dengan begitu jelaslah pemisahan agama dari urusan dunia.

Bentuk-Bentuk Sekular

Dalam perkembangan sejarahnya, sekuler mengarah kepada dua bentuk, yaitu moderat dan ekstrim. Sekular Moderat, yaitu suatu proses sekular yang tidak didasarkan pada penolakan atas nilai-nilai agama dalam masyarakat, tetapi sekularisasi di sini berkeinginan untuk membedakan antara institusi-institusi yang dibangun berdasarkan akal pikiran dan kepentingan pragmatis dengan institusi-institusi yang dibangun berdasarkan agama.²³ Demikian halnya yang dikemukakan oleh al-Bahy, bahwa "dalam sekular moderat agama dianggap sebagai masalah individu yang tidak ada hubungannya dengan negara, tetapi meskipun demikian negara masih memelihara nilai-nilai agama."²⁴

Sekularisme sebagai suatu sistem politik modern, baru menjadi populer di dunia Barat setelah Martin Luther memimpin pemberontakan umat Kristen menentang gereja Katolik Roma

²⁰ Imam Munawwir, *Kebangkitan Islam Dan Tantangan-Tantangan Yang Dihadap Dari Masa KE 5 Masa*, PT, Bina Ilmu, Surabaya, 1984. Hal. 193.

²¹ Mark Juergensmeyer, *Loc.Cit.*

²² Renaisans di Eropa itu kenyataannya menimbulkan tiga implikasi, yaitu implikasi material dan teknik yang ditandai dengan Revolusi di Inggris dan implikasi kemanusiaannya dalam bentuk Revolusi Perancis. Terjadi sekitar pertengahan abad XVIII. Lihat, Marshall G.S. Hudeston *The Venture of Islam*, Vol. 3. The University of Chicago Press, Chicago, 1974. Hal. 165-223

²³ *Ibid.*, hal. 15

²⁴ Muhammad al-Bahy, *Islam Dan Sekularisme: Antara Cinta Dan Kenyataan*, Terjemah Hadi Mulyo, Ramadhani, Solo, 1988. Hal. 13.

tahun 1529 M.²⁵ pemberontakan itu menghasilkan lahirnya agama Kristen Protestan. Perlawanan itulah yang mengakibatkan Eropa mengadopsi sekularisme sebagai sebuah sistem yang tidak mau mengikuti kepentingan sektarian baik Katolik maupun Protestan, melainkan hanya ingin memperhatikan kepentingan umum umat Kristen.

Pemikiran-pemikiran sekular moderat ini dikembangkan oleh banyak tokoh, seperti di Inggris muncul nama Thomas Hobbes yang berpendapat bahwa negara itu merupakan akad atau kesepakatan di mana negara berkewajiban menggiring manusia secara paksa ke dalam akad tersebut, Jhon Locke (1632-1704) yang berpendapat bahwa negara yang modern telah menghapuskan semua wasiat gereja, David Hume (1711-1776) seorang ateis yang mengingkari adanya roh yang kekal, tetapi tetap menganggap agama sebagai kepercayaan. Agama menurut pandangannya bukanlah suatu ilmu tetapi hanya institusi belaka. Di Perancis muncul nama Francois Voltaire (1694-1778) yang digolongkan penganut agama alami dan JJ. Rousseau (1712-1778) yang memfokuskan alam sebagai faktor pemisah sebagaimana ia menjadikan agama dalam pendidikan merupakan suatu hal yang bertentangan dengan alam. Di Jerman muncul nama G.W. Leibniz (1646-1716) yang sependapat dengan Jhon Locke bahwa agama menjadi masalah perorangan yang hanya berurusan dengan individu saja tanpa ada suatu hubungan dengan negara dan Lessing (1729-1781) yang berpendapat bahwa agama bukanlah terminal terakhir melainkan sebagai periode batu loncatan menuju kehidupan manusia.²⁶

Dengan demikian dalam sekular moderat apabila agama tidak membangun institusi-institusi tertentu, maka manusia secara bebas, atau mengambil alih institusi yang dibangun secara sekular. Karena sebenarnya dalam sekular moderat masih mengakui eksistensi Tuhan hanya saja agama dianggap masalah pribadi yang tidak ada hubungannya dengan masalah publik dan dunia material. Motto yang selalu didengungkan adalah "Render what is

²⁵ *The Encyclopedia Americana*, Vol. 24. New York, [s.n.]. Hal. 510.

²⁶ Pardoyo, *Op. Cit.* Hal. 33-34.

caeser to caeser and what is God simbol- simbol to God"²⁷ Sepertinya ini yang akan dikembangkan oleh Soekarno dengan pemikiran sekulemnya, negara adalah negara yang memang bukan urusan agama.

Sedangkan Sekular Ekstrim, yaitu terjadinya suatu proses sosial -politik menuju sekularisme dengan implikasinya yang kuat; yakni adanya ide pemisahan secara total antara negara dan agama.²⁸ Bahkan agama tidak hanya menjadi urusan pribadi, akan tetapi justru negara memusuhi agama.²⁹ Seperti yang terjadi di Rusia, pemerintah mengambil alih agama untuk mengurangi secara drastis pengaruh agama bahkan menghapusnya. Dalam proses ini "agama" dianggap sebagai penghalang bagi kemajuan kehidupan masyarakat, sehingga segala sesuatu yang berhubungan dengan agama harus dirubah.

Tidak dapat diabaikan, bahwa sekularisme juga merupakan salah satu bentuk reaksi dari penyimpangan sosial. Sikap kaum kaya dan kaum berpengaruh yang suka mementingkan diri sendiri dan dogamtisme teologi, semuanya itu merupakan penyulut reaksi; dan tidak mengherankan jika di kalangan kaum pekerja kesadaran terhadap kondisi sosial seperti itu bukan saja mengakibatkan lahirnya teori-teori politik yang ekstrem, tetapi juga menciptakan tendensi untuk bersikap anti-agama.³⁰ Kondisi inilah yang kemudian melahirkan ideologi atheis.

Sekularisme moderat secara formal didirikan di Inggris sebagai sebuah sistem Ethico-filosofis oleh George Jacob Holyoake sekitar tahun 1846 M.³¹ Dalam sekular ekstrim ini mucullah nama-nama Ludwig Feuerbach (1804-1872) termasuk pencetus revolusi sekular terpenting pada abad ke-19. Menurutnya manusia dapat mengkaji periode perpindahan dari agama alamiah yang bersih dan jauh dari pengaruh agama langit. Kemudian Karl Marx (1818-1883) yang anti-Tuhan dan menggunakan metode

²⁷ Rifyal Karya sastra'bah, "Polemik Hubungan Islam Dengan Negara", dalam *Negara Sekuler dalam Polemik*, Putra Berdikari Bangsa, Jakarta, 2000. Hal. 98.

²⁸ Lihat, Syahrani Harahap, *Op. Cit.* Hal. 14

²⁹ Pardoyo, *Op Cit.*, hal\.

³⁰ Peter L. Berger, *Kabar Angin Dari langit*, Terjemah J.B. Sudarmanto, LP3ES, Jakarta, 1991. Hal. 129.

³¹ Encyplodia American, *Lok Cit*

ilmiah dalam mencari bukti kebenaran. Juga Lenin (1870-1924) yang mempraktekkan Marxisme.³²

Sementara menurut al-Bahy faktor yang mendorong terjadi sekular Ekstrem antara lain:

1. perebutan kekuasaan antara negara dan gereja.
2. Pembentukan kekuasaan yang menghendaki penghapusan dualisme dengan penghancuran agama untuk mencapai kekuasaan tersendiri.
3. Penelitian alam dan kemajuan ilmu pengetahuan.
4. Adanya kelompok negara yang menyatakan diri sebagai negara sekular akan tetapi dalam prakteknya tetap memelihara agama.³³

Timbulnya Faham Sekular di Indonesia

Masuknya ideologi-ideologi dunia ke Indonesia terjadi para permulaan abad ke-19. Jika digeneralisasikan, maka ideologi-ideologi tersebut terdapat dua macam ideologi. Pertama, ideologi universal, yaitu ideologi yang menginginkan agar agama menjadi kekuatan penentu (utama) dalam kehidupan bernegara atau negara teokrasi. Kedua, ideologi sekular, yakni suatu ideologi yang menghendaki agar jangan sampai agama menjadi salah satu kekuatan penentu dalam kehidupan kenegaraan. Negara harus netral dalam urusan agama.³⁴ Jika melihat perkembangan yang ada dalam sejarah Indonesia, sehingga wajar, jika hubungan politik antara Islam dan negara di Indonesia pada sebagian besar babakan sejarahnya merupakan cerita antagonisme dan kecurigaan satu sama lain. Hubungan yang tidak harmonis ini, terutama disebabkan oleh perbedaan pandangan para pendiri republik ini yang sebagian besar muslim mengenai negara Indonesia merdeka yang dicita-citakan. Salah satu butir terpenting dalam perbedaan pendapat itu adalah apakah negara itu bercorak "Islam" atau "nasionalis". Konstruksi kenegaraan yang pertama mengharuskan agar Islam, karena sifatnya yang holistik dan kenyataan bahwa agama itu dianut oleh sebahagian besar penduduk, diakui dan

³² Pardoyo, Op. Cit. Hal. 35-36.

³³ Muhammad al-Bahy, Op.Cit. Hal. 35

³⁴ Abdurrahmana Wahid, *Mengurai Hubungan Agama Dan Negara*, PT. Grasindo, Jakarta, 1999. Hal. 83.

diterima sebagai dasar ideologi negara. Tetapi atas pertimbangan bahwa Indonesia adalah negara yang secara sosio-religius bersifat majemuk, maka demi persatuan dan kesatuan nasional, konstruk kenegaraan yang kedua menghendaki agar Indonesia didasarkan atas Pancasila.

Pada awalnya, benturan antara dua kelompok ini berlangsung di sekitar masalah watak nasionalisme, dalam upaya menemukan ikatan bersama untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Soekarno sebagai tokoh nasionalis sekular, menjelaskan bahwa nasionalisme adalah rasa cinta akan manusia dan kemanusiaan, nasionalis yang menerima rasa nasionalismenya itu sebagai suatu wahyu dan melaksanakan rasa itu sebagai suatu bakti, yang terhindar dari semua faham yang sempit. Baginya, rasa cinta bangsa itu adalah lebar dan luas, dengan memberi tempat kepada segala sesuatu.³⁵

Bagi seorang aktivis dan pemimpin Islam politik seperti Agus Salim, ungkapan Soekarno tersebut sama saja artinya dengan mengangkat nasionalisme ke posisi yang setingkat dengan agama. Dan pandangan itu akan memperbudak manusia menjadi penyembah tanah air. Jika demikian adanya maka akibat-akibatnya yang akan muncul adalah mencairkan keyakinan tauhid seseorang dan mengurangi bakti seseorang kepada Tuhan. Sejalan dengan itu, menurutnya prinsip yang harus dinomor- satukan adalah Islam.³⁶ Karena alasan itu, Agus Salim dengan tegas menyatakan bahwa nasionalisme harus diletakkan dalam kerangka pengabdian kepada Allah. Demikian halnya A. Hassan, mengkritik bahwa nasionalistik seperti itu sebanding dengan faham orang-orang Arab mengenai Chawinisme kesukuan (Cashabiyah) sebelum datangnya Islam. Hal ini dilarang oleh Islam, karena praktek ini akan menjadi dinding pemisah sesama umat Islam.³⁷ Dan dikatakannya, bahwa kelompok nasionalis tidak akan menjalankan hukum-hukum Islam, karena kelompok

³⁵ Soekarno, *Di Bawah Bendera Revolusi*, Jilid I, Panitia Penerbit, Jakarta, 1965. Hal. 5-6.

³⁶ Bahtiar Effendy, *Islam Dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktek Politik Islam Di Indonesia*, Paramadina, Jakarta, 1998. Hal. 71.

³⁷ *Ibid*

itu perlu netral pada agama, yaitu tidak perlu mengambil salah satu agama tertentu buat dijadikan asas pemerintahannya kelak.³⁸

Tetapi baru ketika Muhammad Natsir, murid A. Hassan dengan latar belakang pendidikan Barat yang cukup berarti, melibatkan diri dalam perdebatan ini, maka perseteruan religio-ideologis antara kedua kelompok menjadi semakin keras dan sistematis. Mereka tidak hanya terlibat dalam perdebatan-perdebatan religio-ideologis mengenai watak nasionalisme Indonesia, melainkan mengembangkannya ke dalam satu tema yang lebih lebar, yaitu tentang apa yang dapat disebut sebagai negara Indonesia merdeka dan modern yang dicita-citakan. Seperti gurunya, Natsir juga mengkhawatirkan bergulirnya paham nasionalisme Soekarno menjadi suatu bentuk 'ashabiyah baru, yang dapat berujung pada fanatisme yang memutuskan tali ukhuwwah yang mengikat seluruh umat muslimin dari pelbagai bangsa.³⁹ Dengan kata lain, nasionalisme harus didasarkan kepada niat yang suci, ilahiah dan melampaui hal-hal yang bersifat material. Karena itu sebagaimana halnya Agus Salim, ia menyatakan bahwa perjuangan mencapai kemerdekaan Indonesia harus diarahkan atau diniatkan sebagai bagian dari pengabdian yang lebih tinggi kepada Allah.

Pada awal tahun 1940-an, polemik-polemik di atas berkembang jauh melampaui masalah nasionalisme. Polemik-polemik itu menyentuh masalah yang lebih penting, yakni hubungan politik antara Islam dan negara. Dalam periode ini, tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa tidak ada tokoh yang begitu sering terlibat dalam berbagai perdebatan kecuali Soekarno dan M. Natsir.

Paham pemisahan Islam dari negara, dan bukan masalah legal-formal antara Islam dan negara, inilah yang menyulut kritik dari beberapa pemikir dan aktivis Islam politik, khususnya Mohammad Natsir. Bertolak belakang dengan posisi Soekarno, Natsir menjadi pembela utama paham penyatuan agama dan negara. Bagi Natsir, Islam tidak hanya terdiri dari praktik-praktik

³⁸ Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*. LP3ES, Jakarta. Hal. 259.

³⁹ *Ibid.* Hal. 276.

ibadah, melainkan juga prinsip-prinsip umum yang relevan untuk mengatur hubungan antara individu dan masyarakat.⁴⁰

Polemik Soekarno dan Natsir masih bersifat eksploratif. Sejak semula keduanya tidak bermaksud untuk merumuskan konsep-konsep yang siap pakai mengenai hubungan antara agama dan negara. Namun keduanya juga tidak bermaksud untuk mencari titik temu di antara mereka. Keduanya hanya ingin menunjukkan posisi-posisi ideologis-politis masing-masing. Akibatnya perdebatan-perdebatan itu hanya menggarisbawahi berbagai perbedaan yang tampaknya tak terjembatani antara kedua kelompok politik yang berseberangan. Mewakili kelompok nasionalis, Soekarno kurang berhasil memberi substansi keagamaan terhadap pandangannya mengenai hubungan Islam dan negara. Karena itu, meskipun mengimplikasikan faham kaitan non-formal atau etis antara Islam dan negara, namun konsepnya sangat dibayang-bayangi "sekularisme" yang dikembangkan Ataturk.

Dialog Ideologis Konsep Kenegaran

Pertarungan ideologis antara kelompok Islam dan kelompok nasionalis baru berlangsung secara penuh dalam pertemuan-pertemuan BPUPKI yang berlangsung antara akhir Met hingga pertengahan Agustus 1945. Seraya menegaskan kembali alur penalaran teologis dan sosiologis sebelumnya, kelompok yang pertama (dipelopori oleh Ki Bagus Hadikusumo, Abdul Kahar Muzakkir, Abi Kusno Tjokrosujoso, dan A. Wahid Hasyim) menyatakan bahwa Indonesia harus menjadi sebuah negara Islam, atau Islam harus menjadi dasar Ideologi negara. Sedangkan kelompok yang kedua (dipelopori oleh Soekarno, Hatta dan Supomo), seperti tampak dalam pernyataan-pernyataan Hatta dan Supomo, mengusulkan dibentuknya sebuah negara kesatuan nasional di mana masalah-masalah negara harus dipisahkan dari masalah-masalah agama.

Perdebatan-perdebatan di atas baru mereda ketika Soekarno menyerukan agar kedua belah pihak bersedia berkorban demi persatuan bangsa. BPUPKI bersepakat bahwa masa depan

⁴⁰ Mohammad Natsir, *Persatuan Agama Dan Negara*, Capita Selecta, Bulan Bintang, Jakarta, 1973. Hal. 429-495.

Indonesia merdeka akan didasarkan kepada sila "Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya." Selain itu, mereka juga "menerima" Islam sebagai agama negara, dan bahwa presiden Republik Indonesia harus seseorang yang berasal dari umat Islam.⁴¹ Namun segera tampak di permukaan bahwa kompromi tersebut pada dasarnya dibangun di atas landasan yang tidak kokoh. Pada tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah kemerdekaan Indonesia diproklamasikan, Piagam Jakarta dipersoalkan.

Karena itu, para pendiri Republik ini dipaksa untuk kembali melakukan tugas melelahkan dalam rangka memodifikasi dasar ideologi dan konstitusi negara. Dalam upaya ini Hatta menyarankan agar dibuat penyesuaian-penyesuaian tertentu untuk menjamin kesatuan negara nasional Indonesia. Selanjutnya kelompok Islam, seperti Ki Bagus Hadikusumo, Wahid Hasyim, Kasman Singodimejo dan Teuku Muhammad Hassan, bersepakat untuk menghapus unsur-unsur legalistik/ formaistik Islam terutama dengan pencabutan butir-butir mengenai Islam sebagai agama resmi negara, persyaratan bahwa presiden harus seorang muslim dan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya ...⁴² sementara itu unsur teologi monoteistik dimasukkan ke dalam sila pertama dalam Pancasila. Dengan demikian, sila pertama berbunyi: "Ketuhanan Yang Mana Esa".

Selanjutnya perjuangan untuk menegakkan Islam sebagai dasar ideologi negara muncul kembali selama masa kampanye pemilihan umum 1955. Hal ini dipicu oleh pernyataan Soekarno pada tanggal 27 Januari 1953 di Amuntai, Kalimantan Selatan:

Negara yang kita susun dan yang kita ingini ialah negara nasional yang meliputi seluruh Indonesia. Kalau kita dirikan negara berdasarkan Islam, maka banyak daerah-daerah yang penduduk-penduduknya tidak beragama Islam akan melepaskan diri, misalnya Maluku, Ball, Flores, Timor, juga Irian Barat yang

⁴¹ Endang Saifuddin Anshari, *Piagam Jakarta 1945*, Pustaka Perpustakaan Salman ITB, Bandung, 1981. Hal. 21.

⁴² Deliar Noer, *Partai Islam Di Pentas Nasional 1945-1965*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 1987. Hal. 40.

belum masuk wilayah Indonesia tidak akan mau ikut dalam Republik.⁴³

Padahal pada tahun 1945 Soekarno memberikan janji kepada golongan Islam untuk membicarakan kembali tentang dasar negara Islam. Dipelopori oleh Masyumi, kelompok Islam kembali mengajukan gagasan mereka mengenai Islam sebagai dasar ideologi negara. Agenda ini kemudian diperdebatkan secara sengit dan panas dalam Majelis Konstituante (1956-1959).⁴⁴ Kenyataan bahwa kelompok Islam hanya menguasai 43,5 kursi di parlemen membuat mereka sulit untuk segera memutuskan apakah mereka akan terus memperjuangkan gagasan Islam sebagai dasar ideologi negara atau tidak. Secara politis, meskipun kenyataan menunjukkan bahwa kekuatan mereka dalam pemilihan umum tidak menghasilkan kesuksesan ideologis, bagaimanapun mereka tetap harus menunjukkan bahwa mereka adalah politisi-politisi yang tidak mengingkari janji-janji yang telah mereka sampaikan dalam kampanye. Sementara pada akhirnya menerima Pancasila sebagai ideologi negara, upaya mendesak dijadikannya Islam sebagai dasar ideologi negara berfungsi sebagai alat tawar-menawar politik untuk memenangkan tujuan-tujuan politik yang lebih kecil, yakni mendelegasikan kembalinya Piagam Jakarta dan Islam sebagai agama negara.⁴⁵

Dipimpin oleh Mohammad Natsir, Kasman Singodimedjo, Zaenal Abidin, mereka kokoh mempertahankan watak Islam yang holistik. Mereka memandang bahwa Pancasila pada dasarnya adalah ideologi Sekular, tanpa sumber keagamaan yang pasti. Walaupun sila pertamanya mengakui pentingnya kepercayaan kepada satu Tuhan, perumusannya pada dasarnya lebih didasarkan kepada keharusan sosiologis dan bukan keilahiah Tuhan. Dengan kata lain, hal itu merupakan konsepsi mengenai Tuhan yang dibuat oleh manusia dan dapat berubah sewaktu-waktu tergantung situasi. Pendeknya, dalam pandangan mereka, Pancasila itu netral dan tanpa warna, dan kelima silanya tidak

⁴³ Endang Saifiiddin Anshari, *Op.Cit.* Hal. 61.

⁴⁴ *Ibid.* Hal. 69-81.

⁴⁵ Deliar Noer, *Op.Cit.* Hal. 266-267.

saling berkaitan.⁴⁶ Karenanya mereka menolak gagasan Pancasila sebagai dasar negara.

Tanggapan para pendukung Pancasila tidak kurang antagonisnya. Sejalan dengan alur penalaran mereka yang lebih awal, tokoh-tokoh seperti Ruslan Abdulgani, seorang muslim dengan orientasi ideologis-politis nasionalis, menolak pandangan bahwa Pancasila merupakan konsep yang netral, apalagi ideologi sekular. Kenyataan bahwa Pancasila mengandung sila seperti "Ketuhanan Yang Maha Esa", dan bahwa negara mencakup pula badan-badan yang mengurus masalah-masalah yang berhubungan dengan agama. Dan ia percaya bahwa Pancasila mengandung unsur-unsur Islam.⁴⁷

Dalam konteks Pancasila sebagai ideologi negara, mengingat kenyataan bahwa Indonesia adalah sebuah negara yang heterogen secara keagamaan, beberapa tokoh nasionalis memandang Pancasila sebagai suatu kesepakatan bersama. Bagi para politisi PNI dan aktivis Kristen seperti Arnold Mononutu, Pancasila merupakan sebuah sintesis yang memadai bagi berbagai kelompok agama yang berbeda. Jika Islam dijadikan sebagai dasar negara, yang terutama dikhawatirkan adalah tempat kelompok-kelompok agama lain di kepulauan Nusantara. Bagaimanapun, hal itu mengandung citra diskriminasi secara konstitusional.⁴⁸

Sementara itu, beberapa kalangan lain, menolak gagasan mengenai Islam sebagai dasar negara berdasarkan pertimbangan kemungkinannya untuk dapat diterapkan. Mengingat kenyataan bahwa masyarakat Indonesia heterogen secara sosial-religius, mereka meragukan bahwa Islam dapat berperan sebagai pandangan dunia ideologis-politis bagi seluruh masyarakat. Sementara itu Pancasila betapapun tidak sempurnanya, telah terbukti dapat menjadi dasar ideologi bersama seluruh masyarakat Indonesia.⁴⁹

Bagi Nurcholish Madjid, gagasan atau cita-cita "negara Islam" yang dimotori oleh Masyumi pada dasarnya adalah (sutau

⁴⁶ BAhtiar Effendy, *Op Cit.*, hal. 107-108

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ *Ibid.* hal. 109

⁴⁹ *Ibid.*

bentuk kecenderungan apologetik. Dan menurutnya apaologetik itu tumbuh dari dua urusan :

1. apologi kepada ideologi Barat seperti demokrasi, sosialisme, dan komunisme. Apologi kepada ideologi Inpedm itu menimbulkan adanya apresiasi yang bersifat politis kepada Islam. Apresiasi ini diharapkan melahirkan "negara Islam", sebagaimana bisa melahirkan negara demokrasi, negara sosialis, negara komunis dan sebagainya.
2. Legalisme, yang membawa sebagian kaum muslimin ke pemikiran apologetik "negara Islam", yang menggambarkan bahwa Islam itu adalah struktur dan kumpulan hukum.⁵⁰

Serangan paling akhir terhadap konstruk lama Islam-politik, terutama dalam kerangka simbolisme ideologisnya, berlangsung pada tahun 1983. Ketika Orde Baru berupaya besar-besaran untuk menyosialisasikan Pancasila, mendorong pemerintah untuk menerapkan kebijakan Pancasila sebagai asas tunggal bagi seluruh organisasi politik yang ada (Golkar, PPP dan PDI). Dalam pidato tahunannya di depan DPR, pada tanggal 16 Agustus 1982, presiden Soeharto menegaskan bahwa "seluruh kekuatan sosial dan politik harus menyatakan bahwa dasar ideologi mereka satu-satunya adalah Pancasila." Karena terpojok oleh desakan ideologis ini, baik PPP maupun PDI tampaknya tidak mempunyai pilihan lain kecuali menerima Pancasila sebagai asas ideologi mereka. Dalam kongresnya pada bulan Agustus 1984, PPP mengganti Islam dengan Pancasila sebagai dasar ideologi mereka dan mengubah simbolnya dari Ka'bah menjadi bintang.⁵¹

Nampaknya dari perjalanan sejarah yang ditampilkan dalam peta politik Indonesia mengarahkan Indonesia negara sekular yang moderat, di mana agama (Islam) dalam konstitusi negara tidak dijadikan sebagai landasan dasar negara, namun demikian nilai-nilai agama masih tetap dipertahankan dan dijadikan sebagai landasan etik dalam kehidupan bermasyarakat.

⁵⁰ Nurcholois Madjid, *Islam, Kemoderenan Dan Keindonesiaan*, Mizan, Bandung, 1987. Hal. 253-255.

⁵¹ M. Natsir Tamara, *Sejarah Politik Islam Orde Baru*, Prisma No. 51, 1988. Hal. 49.

Daftar Pustaka

- John L. Esposito (ed), *Dinamika Kebangkitan Islam: Watak, Proses dan Tantangan*, Rajawali Pers, Jakarta, 1987.
- Dawam Raharjo, *Intelektual Intelegensia Dan Perilaku Politik Bangsa*, Mizan, Bandung, 1993.
- Harvey Cox, *The Secular City*, New York, The Macmillan Company, 1966.
- Syahrin Harahap, *Al-Qur 'an Dan Sekularisasi*, PT. Tara Wacana, Yogya, 1994.
- Dr. Yusuf Qaradhawy, *Sekular Ekstrim, Terjemah Nabhani Idris*, Pustaka al-Kautsar, Jakarta Timur, 2000.
- Hasan Shadily, *Ensiklopedi Indonesia*, Jilid 5, Ichtiar Baru-Hoeve, Jakarta, 1984.
- Ismail al-Kilany, dalam *Sekularisme: Upaya Memisahkan Agama dari Negara*, Penerjemah Kathur Suhardi, Pustaka al-Kautsar, Jakarta Timur, 1992.
- Mark Juergensmeyer, *Menentang Negara Sekular*, Penerjemah Noorhaidi, Mizan, Bandung, 1998.
- Harun Hadiwijono, *Sari Sejarah Filsafat Barat 2*, Kanisius, Yogyakarta, 1983.
- James Hastings (ed). *Encyclopedia of Relligion and Ethic*, Vol. XI, Charles Scribner' simbol-simbol Sons [s.a.]. New York.
- Imam Munawwir, *Kebangkitan Islam Dan Tantangan-Tantangan Yang Dihadap Dari Masa KE 5 Masa*, PT, Bina Ilmu, Surabaya, 1984.
- Marshall G.S. Hudgeston *The Venture of Islam*, Vol. 3. The University of Chicago Press, Chicago, 1974.
- Muhammad al-Bahy, *Islam Dan Sekularisme: Antara Cinta Dan Kenyataan*, Terjemah Hadi Mulyo, Ramadhani, Solo, 1988.
- Rifyal Karya sastra'bah, "Polemik Hubungan Islam Dengan Negara", *dalam Negara Sekuler dalam Polemik*, Putra Berdikari Bangsa, Jakarta, 2000.
- Peter L. Berger, *Kabar Angin Dari langit*, Terjemah J.B. Sudarmanto, LP3ES, Jakarta, 1991.
- Abdurrahmana Wahid, *Mengurai Hubungan Agama Dan Negara*, PT. Grasindo, Jakarta, 1999.

Soekarno, *Di Bawah Bendera Revolusi*, Jilid I, Panitia Penerbit, Jakarta, 1965.

Bahtiar Effendy, *Islam Dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktek Politik Islam Di Indonesia*, Paramadina, Jakarta, 1998.

Deliar Noer, *Gerakan Modem Islam di Indonesia 1900-1942*. LP3ES, Jakarta.

Mohammad Natsir, *Persatuan Agama Dan Negara*, Capita Selecta, Bulan Bintang, Jakarta, 1973.

Endang Saifuddin Anshari, *Piagam Jakarta 1945*, Pustaka Perpustakaan Salman ITB, Bandung, 1981.

Deliar Noer, *Partai Islam Di Pentas Nasional 1945-1965*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 1987.

Nurcholois Madjid, *Islam, Kemoderenan Dan Keindonesiaan*, Mizan, Bandung, 1987.

M. Natsir Tamara, *Sejarah Politik Islam Orde Baru*, Prisma No. 51, 1988.